

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di perlukan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tujuan akhir dari sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga untuk menjalankan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, menjaga aset negara aman, dan memastikan laporan keuangan yang andal. Lima elemen membentuk pengendalian internal yaitu : lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas pengendalian; komunikasi dan informasi; dan pengawasan (Arens et al., 2012; Bodnar & Hopwood, 2010; Peraturan Pemerintah, 2008).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Rote Ndao adalah upaya dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan administrasi publik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mulai di terapkan di Kabupaten Rote Ndao Pada tahun 2014, yang fokus pada tim pengendalian internal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit mempunyai mekanisme pengawasan internal yang

bertujuan menandai guna mencegah penyimpangan dan korupsi. Sejak awal penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2014, terdapat beberapa masalah yang ditemukan secara garis besarnya yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai mengenai SPIP serta keterbatasan dalam pengawasan dan internal. Sesuai dengan data yang diperoleh sejak di terapkan SPIP dari tahun 2014 sampai 2017 terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dan terdapat belanja sewa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Hal ini meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal inilah yang masih juga ditemui pada beberapa entitas atau SKPD pada Kabupaten Rote Ndao yang menimbulkan dampak terhadap Pernyataan “Tidak Memberikan Pendapat” yang di mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK yang dimana membutuhkan perhatian serius untuk ditindak lanjuti.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diajukan untuk memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LKPD) pada Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2018 sampai 2019 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun Anggaran 2020 sampai 2022 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1.1 menyajikan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao dari tahun

2018 sampai 2022. Data ini mencakup opini yang diberikan BPK, terkait hasil temuan BPK mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI), temuan kepatuhan, dan jumlah atas keseluruhan dari temuan untuk setiap tahun. Opini BPK adalah suatu Indikator penting dalam hal menunjukkan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Sebagai catatan, dalam jangka 5 tahun ini, Kabupaten Rote Ndao Mengalami perubahan yang signifikan dalam opini yang diterima, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun itu, masih ada berbagai temuan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lanjutan.

Tabel ini disusun berdasarkan data yang didapatkan dari Inpektorat Kabupaten Rote Ndao yang memberikan gambaran tentang perkembangan kualitas pengelolaan keuangan daerah selama periode tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK terhadap LKPD Pemda Rote Ndao**

Tahun	OPINI	Temuan		Jumlah
		SPI	Kepatuhan	
1	2	3	4	5
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	8	5	13
2019	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	4	6	10
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4	3	7
2021	Wajar Tanpa Pengencualian (WTP)	9	6	15
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	7	3	10

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini WDP (Wajar

Dengan Pengecualian) terhadap LKPD Kabupaten Rote Ndao. Opini WDP ini menunjukkan terdapat beberapa masalah yang ditemukan. BPK mencatat adanya 8 kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern seperti pengelolaan kas dan rekening tidak tertib, pengelolaan persediaan yang tidak memadai, ketidakakuratan dalam pencatatan aset tetap, kelemahan dalam sistem informasi akuntansi, pengendalian pengeluaran yang lemah, ketidakpatuhan dalam pengelolaan pendapatan, manajemen proyek yang tidak efektif, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa yang tidak memadai. Terdapat juga 5 pelanggaran kepatuhan terhadap perundang-undangan dimana penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan, pemberian tunjangan insentif yang tidak sesuai, ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana bantuan, kekurangan dalam pengelolaan pajak daerah, dan terakhir pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa. Masalah yang sudah diungkapkan ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum bisa dipercaya, masih terdapat pengecualian-pengecualian yang perlu di perbaiki guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Untuk TA 2019 juga memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap LKPD di Kabupaten Rote Ndao. Opini WDP diberikan ketika laporan keuangan secara umum wajar, namun masih ada beberapa pengecualian dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK mengidentifikasi 10 masalah, yang dimana terbagi atas 4 masalah SPI hal ini adalah pencatatan aset tidak memadai, pengendalian anggaran yang lemah, pencatatan pendapat tidak akurat, dan kelemahan dalam proses pengadaan. Untuk masalah kepatuhan terdapat

penggunaan dana yang tidak sesuai, pelaporan belanja tidak tepat waktu, ketidakpatuhan terhadap regulasi pajak, kelemahan pelaksanaan proyek, pengelolaan dana desa yang buruk, dan tidak tertib administrasi keuangan, secara keseluruhan opini WDP dengan temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao secara umum dapat diterima, tetapi terdapat kelemahan signifikan dalam pengendalian internal dan kepatuhan peraturan yang perlu untuk diperbaiki.

Berbeda dengan Tahun Anggaran sebelumnya, pada tahun 2020 Pemda Rote Ndao menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK hal ini menunjukkan bahwa secara umum, laporan keuangan disajikan dengan wajar, hal ini dinilai baik, akan tetapi masih ada beberapa temuan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ditemukan 4 temuan mengenai SPI hal ini mencakup kelemahan atas proses penganggaran, pengendalian aset, pengelolaan pendapatan, pengeluaran daerah. Dan untuk temuan atas kepatuhan, ada 3 temuan mencakup pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Sama seperti Tahun Anggaran 2020, di Tahun Anggaran 2021 juga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Opini ini menunjukkan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, akan tetapi BPK masih menemukan masalah terkait SPI yang mendapatkan 9 temuan yang menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada pengelolaan internal, seperti pengelolaan kas belum baik, dan

pencatatan aset yang belum akurat, ada juga 6 temuan mengenai kepatuhan terhadap perundang-undang seperti prosedur pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai dengan ketentuan dan pengadaan dana yang tidak sesuai dengan anggaran. Meskipun TA 2021 mendapatkan opini WTP, Pemda Rote Ndao masih harus memperbaiki SPI dan Kepatuhan terhadap regulasi upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemda Rote Ndao.

Dan yang terakhir Tahun Anggaran 2022 juga mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK akan tetapi sama seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dikatakan baik masih saja ditemukan masalah, untuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) ditemukan 7 kelemahan seperti kelemahan pengelolaan aset tetap, pengeluaran anggaran, kelemahan pengelolaan persediaan, pelaporan keuangan, pengelolaan piutang, dan sistem informasi. Dalam kelemahan SPI ini misalnya bangunan dan kendaraan yang tercatat dengan baik yang berdampak pada kebingungan dalam hal pelaporan, pengelolaan kas kecil yang belum sesuai prosedur, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dan untuk kepatuhan ditemukan adanya 3 kelemahan seperti pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak selalu transparan, dan pengelolaan pajak serta retribusi yang belum optimal, misalnya seperti proyek pengadaan tanpa lelang yang jelas, serta pajak yang diperoleh belum tercatat dengan baik.

Dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, mendapatkan dua macam opini yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian). Meskipun opini tersebut sudah dikatakan baik dan bisa diterima, masih saja ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu dilakukan perbaikan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Salah satu faktor krusial dalam upaya perbaikan ini adalah sumber daya manusia, seperti arti dari sumber daya manusia itu sendiri adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa) (Sutrisno, 2014),. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kemajuan teknologi dan perkembangan informasi memerlukan dukungan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia dalam hal menjalankan SPIP dari masalah yang terkait SDM aparat pemerintah masih sangat membutuhkan perhatian yang lebih serius dan diperlukan sebuah revolusi dalam jumlah mutu SDM.

Penelitian Mali (2019), “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao” menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dibutuhkan dalam menciptakan keandalan terhadap perundang-undangan yang berlaku dimana tujuan untuk mencapai kesuksesan dari Sistem Pengendalian Intern ini yaitu mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan di jelaskan faktor penghambat dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yaitu dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern kurang adanya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Dinas, faktor lain yaitu kurangnya kesiapan terhadap Sumber Daya Manusia.

Suandewi (2021), “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Sekacamatan Payangan) penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh positif dan sangat signifikan dalam hal melakukan pencegahan terhadap kecurangan, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas bisa menghindari yang namanya salah saji dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam hal melakukan tanggung jawab, ada beberapa faktor yang dapat mencegah yang namanya kecurangan yaitu Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas, *whistleblowing*.

(Omposunggu & Salomo, 2019), “Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia” penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari sistem pengendalian intern pemerintah belum sepenuhnya diimplementasikan dalam hal tata cara kelola pemerintah Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian intern yaitu : konten dan konteks kebijakan, tidak adanya penerapan saksi, kurang matangnya suatu pertimbangan, kesalahan dalam menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam implementasi sistem pengendalian intern, dan juga kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah, selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern (Kawedar, 2010). Implementasi SPIP menggunakan pendekatan COSO hal ini menekan pada komponen-komponen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktifitas, informasi dan komunikasi, dan terakhir pemantauan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan berbagai alasan dan masalah yang telah di paparkan oleh peneliti, dimana peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum bisa dikatakan optimal, dengan itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Kasus Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di ambil peneliti untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran SDM dalam implementasi SPIP studi kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran SDM dalam implementasi SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan penelitian yang di ambil peneliti untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran SDM dalam implementasi SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran SDM dalam implementasi SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni :

1. Bagi Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao  
Penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai Sumber Daya Manusia dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao.
2. Bagi Akademik  
Dapat menambah referensi untuk kedepannya mengenai Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan Implementasi di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi serta sumber data untuk peneliti selanjutnya